

Edisi
02
Tahun 2022

WARTA KESMAS

Aksi Bersama CegahStunting

Upaya Pencegahan
dan Penurunan
Stunting

Aksi Bergizi Menjadi
Upaya Cegah Stunting
dan Implementasi
Transformasi Layanan
Primer

**Pencanangan Gerakan
Bumil Sehat**

Langkah Untuk Mencegah AKI dan Stunting

**Kemenkes Jamin Kesehatan
Ibu Melahirkan**

Dengan Program Jampersal



Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia





**Bumil
Sehat**



Mari Dukung Ibu Hamil

Lebih Sehat dan Bahagia

#22kamisayangibu #gerakan22
#bumilsehat #aksigermas



**Konsumsi Tablet Tambah
Darah** tiap hari, makan sesuai
rekomendasi dan pantau
peningkatan berat badan



Periksa kehamilan
minimal 6 kali dan 2 kali
di antaranya USG oleh
dokter



**Mengikuti kelas
ibu hamil**
minimal 4 kali



**Melakukan
persalinan di
Fasyankes**





DAFTAR ISI

6

“Kesmas Berkembang” Upaya peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen Kesmas

8

Kemenkes Berikan Penghargaan Mitra Bakti Husada GP2SP, K3, dan Protokol Kesehatan Covid-19 Kepada 62 institusi dan perusahaan

9

Gempa Cianjur TGC Kesmas Gerak Cepat Membantu

10

Semarak Puncak Peringatan HKJS 2022

12

Kick off Gerakan Bumil Sehat, Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia

14

Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting

18

Kemenkes Jamin Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Program Jampersal

24

Menteri Kesehatan Ajak Mitra Berkontribusi Bersama Cegah Stunting

25

Aksi bergizi, Menjadi Upaya Cegah Stunting dan Implementasi Transformasi Layanan Primer

27

Pencanangan Gerakan bumil sehat Langkah untuk mencegah AKI dan Stunting

29

Kabupaten Garut Siap Melaksanakan Integrasi Pelayanan Primer

31

Transformasi Layanan Primer Kesehatan Jiwa Ditekankan Pada Program Promotif Preventif

33

Public Health Fair HKN ke-58 Ajak masyarakat Mengenal Fase Kehidupan Untuk Hidup Sehat

35

Layanan Promotif Preventif Jauh Lebih Murah Daripada Upaya Kreatif

37

Peringati Hari AIDS Sedunia, Ini Penyebab, Kendala, dan Upaya Kemenkes Tangani HIV di Indonesia





“Kesmas Berkembang” Upaya Peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen Kesmas

MenTransformasi Sistem Kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selain dilakukan pada sistem pelayanan Kesehatan yang ditunjukkan pada 6 (enam) pilar transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga melakukan transformasi internal guna mendukung pelaksanaan perubahan besar tersebut. Bentuk transformasi internal diantaranya perbaikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh setiap unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.



Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan inisiasi

peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan berjenjang, dan saat ini diawali dahulu dengan sasaran pada para pimpinan dan ketua tim kerja. Kesamaan visi untuk pencapaian tujuan menjadi hal utama yang fundamental sehingga seluruh pimpinan dapat menyusun strategi dan langkah kerja menuju tujuan yang sama, maka dari itu diadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen Kesmas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Oktober 2022 diikuti oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, para eselon 2, para PMO Ditjen Kesmas, para kepala sub bagian Administrasi Umum, dan para ketua Tim Kerja di Lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Dirjen Kesmas, dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan, “Peningkatan kapasitas di lingkup Ditjen Kesmas kali ini mengusung tema Kesmas Berkembang, dimana Kesmas Berkembang merupakan tujuan bersama untuk membentuk satuan



kerja yang mampu bekerja dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Untuk menuju Kesmas Berkembang, didukung dengan Kesmas bermimpi, Kesmas belajar dan Kesmas Apresiasi. Kesmas Bermimpi adalah bentuk bahwa Ditjen Kesmas mampu mengembangkan diri dengan segala inovasi dalam satu visi yang sama mewujudkan 6 (enam) pilar transformasi Kesehatan.”

“Kesmas Belajar merupakan bentuk Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat akan senantiasa mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, menggali ilmu sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi tanpa meninggalkan nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kesmas Apresiasi merupakan bagian pengembangan Ditjen Kesmas yang mampu memberikan penghormatan pada setiap proses dan pekerjaan yang dilakukan, menumbuhkan motivasi

bagi seluruh pegawai karena diyakini bahwa kemampuan seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kemauan, dan kemauan untuk melakukan sesuatu perlu didorong dengan sangat memperhatikan kebutuhan setiap pegawai.” imbuhnya.

Transformasi Kesehatan melalui 6 (enam) pilar perlu dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan yang kolaboratif, dimana setiap unit maupun tim kerja memiliki peranan penting dan saling

terkait dengan tujuan : a) Mewujudkan Kemenkes Berakhlak b) Menyatukan visi dan tujuan dari setiap pimpinan di lingkup Ditjen Kesmas c) Meningkatkan kapasitas pegawai di lingkup Ditjen Kesmas d) Mengetahui kebutuhan dan hal yang dapat memotivasi, serta memberikan apresiasi pada pegawai Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Oleh: Risti Paramita Widasena





Kemenkes Berikan Penghargaan Mitra Bakti Husada GP2SP, K3, dan Protokol Kesehatan Covid-19 Kepada 62 institusi dan perusahaan

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memberikan penghargaan dan apresiasi Mitra bakti Husada kepada 62 institusi dan perusahaan yang berhasil menerapkan Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan implementasi protokol kesehatan Covid-19.

Penghargaan ini diberikan setiap tahun yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Dan tahun ini bertepatan dengan peringatan HKN ke-58.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi didampingi oleh Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Kartini Rustandi di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/11).



Dalam laporannya, Maria Endang Sumiwi menyebutkan bahwa penerima penghargaan Mitra Bakti Husada terdiri dari 62 penerima yang terbagi dalam dua kategori yakni K3 Perkantoran dan Gerakan pekerja perempuan sehat produktif.

Untuk kategori K3 Perkantoran diberikan kepada 6 perusahaan, penghargaan Mitra Bakti Husada diberikan kepada 37 Perusahaan terdiri dari 34 perusahaan manufacturing, 2 perusahaan pertanian dan perkebunan dan 1 perusahaan jasa.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 6 perusahaan yang berupaya melaksanakan GP2SP, 6 perusahaan yang telah melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dan protokol kesehatan Covid-19, lalu dinas kesehatan yang telah melakukan pembinaan GP2SP kepada perusahaan di wilayahnya serta 7 institusi dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembinaan K3 di perkantoran wilayah kerjanya.

Dengan semangat peringatan HKN ke-58 yang mengangkat tema “Bangkit Indonesiaku, Shat Negeriku,” kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dan mempercepat terwujudnya masyarakat pekerja yang sehat, Bugar yang menjadi pondasi menuju Indonesia emas tahun 2045,” tutup Sekjen.

Oleh: Erlangga Wibisono Gunadi



Gempa Cianjur, TGC Kesmas Gerak Cepat Membantu

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada 21/11/2022 pukul 13.21 WIB dengan kekuatan 5,6 Skala Richter mengakibatkan dampak yang cukup besar. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di infokan jumlah korban jiwa mencapai 328 jiwa dan 12 lainnya masih dinyatakan hilang dan masuk Daftar Pencarian, dan total 109.386 jiwa mengungsi.

Menanggapi kejadian bencana alam tersebut, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengirim Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas melakukan asesmen dan memberikan bantuan kesehatan kepada para korban, khususnya permasalahan kesehatan masyarakat bagi para pengungsi.

Bantuan yang diberikan seperti pemenuhan gizi bagi anak, balita, dan membantu tindakan persalinan di pengungsian. Selain bantuan berupa edukasi untuk

tetap sehat fisik dan sehat mental selama di pengungsian. Bantuan dan kegiatan yang diberikan berdasarkan sub kluster TGC terdiri dari:

Sub kluster Kesehatan Reproduksi (Kespro)

- 1 **Tenda Kespro 1 set**
- 2 **Kit lansia perempuan 100 pcs**
- 3 **Hygiene kit 100 pcs**
- 4 **Kit ibu hamil 50 pcs**
- 5 **Kit pasca melahirkan 50 pcs**
- 6 **Kit bayi baru lahir 50 pcs**

Dengan penyediaan pelayanan Kespro melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) pada situasi bencana/krisis kesehatan berupa:

- 1 **Assessment fasilitas kesehatan dan kelompok rentan terdampak**
- 2 **Aktifasi subkluster Kespro, koordinasi berkala, dan media komunikasi**
- 3 **Mapping dan pembagian peran dengan mitra**

- 4 **Penentuan lokasi dan pendirian tenda kespro dan puskesmas darurat.**
- 5 **Identifikasi kebutuhan dan penyediaan SDM, sarana prasarana, alat dan obat kontrasepsi, kit, media KIE**

Sub kluster Promosi Kesehatan (Promkes)

- 1 **Edukasi kesehatan melalui permainan interaktif.**
- 2 **Pendistribusian media pesan kesehatan**
- 3 **Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial**
- 4 **Penyuluhan kelompok tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**
- 5 **Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**



Kegiatan dan aktivitas kluster
Promosi Kesehatan:

- 1 Peningkatan kapasitas tim Promkes Dinas Kesehatan Kab. Cianjur dan pendampingan dengan memberikan sharing materi peran Promkes dalam bencana.
- 2 Pelibatan Pramuka Peduli dan Saka Bakti Husada dalam penganganan di lokasi pengungsian
- 3 Penyakit-penyakit (DBD, Diare dll) akibat bencana di tempat-tempat pengungsian terkontrol dengan baik
- 4 Menciptakan kawasan pengungsian bebas asap rokok, untuk semua, baik pengungsi dan relawan dengan melakukan advokasi kepada koordinator tiap-tiap tempat pengungsian serta pemasangan informasi media larangan merokok di sekitar tempat pengungsian
- 5 Penguatan protokol kesehatan lagi, dengan terus menerus di ingatkan kepada masyarakat pengungsi serta relawan untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan CTPS melalui pengeras suara
- 6 Adanya kader-kader kesehatan dari masyarakat pengungsi dengan di dampingi kakak-kakak Pramuka SBH, untuk selalu menciptakan tempat pengungsian yang bersih

- 7 Adanya media-media kesehatan (poster, baliho, flyer, dll) yang terpasang di tempat-tempat pengungsian. Sebagai pengingat agar selalu hidup sehat walau di pengungsian
- 8 Terjadwal secara rutin tiap hari Rabu, Jumat dan Minggu di tempat pengungsian melakukan senam pagi dibawah arahan Promkes Puskesmas dan di bantu Kakak Pramuka SBH sebagai Instruktur senam
- 9 Dan setelah senam di lanjutkan kegiatan mengajarkan masyarakat pengungsi dengan cara-cara bagaimana cuci tangan yang benar serta perilaku PHBS lainnya, serta hiburan bernyanyi dan bergerak bersama dengan menyanyikan lagu-lagu yang sedang hits

Sub kluster Jiwa

- 1 **Rapid Health Assessment (RHA) Kesehatan Jiwa**
- 2 **Koordinasi dengan organisasi profesi, NGO, provinsi, dan kabupaten**

Kegiatan yang dilakukan:

- 1 Edukasi Kesehatan Jiwa
- 2 Skining kesehatan jiwa pasca bencana
- 3 Pendampingan psikologis
- 4 Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial
- 5 Pengobatan

Sub kluster Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- 1 **Balita kit 60 pcs**
- 2 **PMT Balita 3 ton**
- 3 **PMT Bumil 2 ton**

Pelayanan Gizi dan KIA:

- 1 Posyandu Darurat (Skrining, PMT, Vit. A, zinc, konseling, imunisasi, dll) oleh Puskesmas di Kab. Cianjur
- 2 Pengawasan Ketersediaan Obat Esensial Gizi dan KIA oleh Dinkes Kab. Cianjur

Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA):

- 1 Dapur PMBA pada titik pengungsian, Oleh Dinkes Cianjur
- 2 Pendampingan PMBA dan Konseling Menyusui oleh OP Kab/Prov
- 3 Orientasi dan atau Refreshing PMBA – Konseiling Menyusui untuk SDM lokal oleh Pemkab Cianjur



Oleh: Erlangga Wibisono Gunadi



Semarak Puncak Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2022

Bertempat di Aula Terbuka RSJ Bangli Provinsi Bali, Direktorat Kesehatan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI bersama Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSWAKOI) kembali menggelar acara tahunan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022. Gelaran tahunan ini mempunyai tujuan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan Jiwa dan mendukung penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa terpadu di Indonesia. Selain itu peringatan HKJS juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan memperingati HKJS ini adalah : Meningkatkan gerakan bersama dalam mendukung penguatan upaya promotive preventif sehat jiwa di daerah di seluruh Indonesia, mendorong pencapaian implementasi upaya promotive preventif Sehat Jiwa di daerah

dan menekan timbulnya masalah kesehatan jiwa di kalangan masyarakat.

Pentingnya Kesehatan Jiwa yang menandakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Karena Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Beban masalah kesehatan jiwa terus meningkat yang berdampak terhadap kesehatan dan konsekuensi sosial, hak asasi manusia dan ekonomi utama di semua negara di dunia.

Di Indonesia, dengan berbagai faktor religi, biologis,

psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan peningkatan beberapa masalah kesehatan jiwa, yaitu: prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga menderita gangguan jiwa Skizofrenia/Psikosis meningkat dari 1,7 per mil (Riskesdas 2013)



menjadi 7 per mil; terdapat sekitar 31,5% Rumah Tangga melakukan pasung terhadap penderita Skizofrenia/Psikosis dalam 3 bulan terakhir; hanya sekitar 41,8% penderita Skizofrenia/Psikosis yang minum obat secara teratur; Prevalensi Depresi pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 6,1% (sekitar 12 juta penduduk umur ≥ 15 tahun) dan hanya 9% yang minum obat/ menjalani pengobatan medis; Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur ≥ 15 tahun mengalami peningkatan dari 6% (Risikesdas 2013) menjadi 9,8% atau sekitar 20 juta penduduk umur ≥ 15 tahun (Risikesdas 2018).

Masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta perhatian dari

seluruh masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

HKJS tahun ini dipusatkan di Alun alun Kabupaten Bangli Provinsi dengan dimeriahkan Gerak Jalan santai Bersama karyawan ASN, karyawan Swasta, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adt dan para pelajar se Kabupaten Bangli sebanyak 2000 orang dilanjutkan dengan melaksanakan senam kesehatan jiwa dan skrining Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) bagi pelajar SMP dan SMA berusia 15 – 18 tahun. Suasana peringatan

HKJS ini lebih semarak karena dihadirkan hiburan musik dan doorprize dari panitia penyelenggara.

Sosialisasi dan kepedulian Penggerakan Sehat Jiwa Bagi Masyarakat dalam puncak peringatan HKJS tahun 2022 ini akan diikuti oleh 500 orang peserta yang terdiri dari: Pemerintah Daerah (Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota, Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas), Institusi Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, serta media massa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari di ruangan / aula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan seluruh peserta diwajibkan memakai masker, rajin mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak aman.

Oleh: Bambang Purwanto





Kick off Gerakan Bumil Sehat, Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia

Stunting merupakan permasalahan bersama tidak hanya pada sektor kesehatan. Untuk menurunkan angka stunting, Pemerintah telah melakukan upaya intervensi spesifik yang dilakukan sebelum dan saat kehamilan. Sebelum kehamilan Kementerian Kesehatan telah melakukan Gerakan Aksi Bergizi yang ditujukan bagi remaja

putri dan telah dijalankan di seluruh Indonesia.

Upaya selanjutnya pada saat kehamilan adalah melalui Gerakan Bumil Sehat yang baru saja dilakukan kick-off nya pada Rabu malam (14/12) di Discovery Hotel Ancol, Jakarta. Selama pandemi Covid-19 layanan esensial bagi ibu hamil sempat terhambat

dan menurun pelaksanaannya. Bertepatan juga dengan hari Ibu tanggal 22 Desember, Kemenkes ingin menggelorakannya lagi melalui Gerakan Nasional Bumil Sehat. Kampanye #BumilSehat melibatkan Kementerian/ Lembaga di tingkat Pusat dan Daerah, swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat, serta seluruh masyarakat.



Gerakan ini dilakukan karena kita bersama-sama ingin memberikan awal kehidupan yang baik bagi anak kita untuk dapat hidup dan tumbuh sehat. Serta peristiwa persalinan yang seharusnya bahagia juga tidak menjadi peristiwa yang duka, anak dan ibu dapat hidup sehat dan selamat. Sembilan bulan kehamilan bukan waktu yang singkat untuk mengoptimalkan setiap detail pertumbuhan janin. Apalagi dari 5 juta ibu hamil yang tercatat, 1 jutanya bekerja dengan beragam jenis pekerjaan. Ibu bekerja kadang

sering terlupa menjaga kesehatan dan kehamilannya. Untuk itu ibu hamil perlu dukungan tidak hanya dari suami maupun keluarga, namun juga tempat kerja, dan kita semua masyarakat sekitarnya.

Momentum ini untuk bersama-sama melindungi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua ibu hamil di Indonesia lebih sehat dan bahagia melalui:

- 1 Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dan 2 kali diantaranya USG oleh dokter
- 2 Mengikuti Kelas Ibu Hamil minimal 4 kali
- 3 Konsumsi Tablet Tambah Darah setiap hari, makan sesuai rekomendasi dan pantau berat badan
- 4 Melakukan persalinan di fasyankes

“Saya yakin bahwa upaya dalam mendukung Ibu hamil sehat ini akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia untuk terbentuknya

generasi sehat Indonesia unggul bebas stunting.” kata Dirjen Kesmas menutup sambutannya.

Oleh: Marsha Anindita





Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting

Salah satu bagian dari peningkatan derajat kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah melalui upaya perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi keluarga untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Gizi memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan selama siklus kehidupan manusia.

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Kerawanan pangan dan gizi meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok

rentan, bahkan masalah gizi kronik (stunting)



Di Indonesia, dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi ibu hamil risiko Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 17,3%. Sementara itu berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,1 % dan balita stunting sebesar 24,4%. Arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada pidato kenegaraan menyampaikan pesan kesehatan sebagai berikut: "Titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan

ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada stunting, kematian bayi, kematian ibu yang meningkat." Merujuk arahan tersebut penurunan stunting merupakan prioritas pembangunan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diatas, Kemenkes mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi balita melalui penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Dalam upaya percepatan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 memiliki peran untuk percepatan pencapaian 9 indikator Intervensi Gizi Spesifik, yang dua indikator diantaranya adalah Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang

mendapatkan tambahan asupan gizi dan Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi

Capaian 2 (dua) Indikator tersebut adalah sebagai berikut: pada tahun 2021 Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi (PMT) sebesar 84,2% dan Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (PMT) sebesar 77,9%. Sedangkan pada tahun 2022 pada triwulan 1, cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK sebesar 86,14% dan PMT untuk balita gizi kurang

sebesar 58,72%. Pada tahun 2022 ini merupakan masa transisi rencana perubahan talaksana PMT kepada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, yaitu perubahan dari PMT biskuit (pabrikan) menjadi PMT yang berbasis pangan lokal. Oleh karena itu pada tahun 2022 akan dilakukan piloting pelaksanaan PMT berbasis pangan lokal di 31 Kabupaten/Kota terpilih, sebagai persiapan pelaksanaan PMT berbasis pangan lokal pada tahun 2023. Untuk sementara kegiatan piloting PMT berbasis pangan lokal ini didanai melalui APBN Pusat, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Sedangkan pada tahun 2023 rencana

pendanaannya akan diarahkan melalui DAK non fisik di tingkat kabupaten/kota, namun bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskalnya (KFD) yang baik diharapkan pendanaannya melalui APBD. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 24,4% dan prevalensi wasting sebesar 7,1%. Melihat kemajuan yang kita capai dari tahun ke tahun tentunya kita punya harapan bahwa kedepannya stunting akan terus turun hingga mampu mencapai target 14% dan wasting 7% pada tahun 2024 sehingga stunting dan wasting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.



Roadmap intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting yang dilakukan :

- 1 Intervensi di hulu pada Remaja Putri yaitu remaja putri mengonsumsi TTD 1 tablet setiap minggu, skrining anemia, edukasi remaja putri
- 2 Intervensi pada ibu hamil yaitu Ibu hamil mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilan, skrining anemi dan edukasi hamil
- 3 Intervensi pada ibu hamil yaitu skrining status gizi ibu hamil dengan pemeriksaan lingkaran lengan atas dan edukasi hamil
- 4 Pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan sebagai salah satu standar Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
- 5 Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
- 6 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, deteksi dini dengan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, Puskesmas dan fasilitas kesehatan jejaring sesuai jadwal.. Pemantauan pertumbuhan dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Pemantauan perkembangan (kemungkinan gangguan motorik/kemampuan bicara/sosialisasi/kemandirian) dilakukan tiga bulan sekali.
- 7 Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi selama 90 hari
- 8 Balita gizi buruk mendapat tata laksana balita gizi buruk di faskes terlatih

Pemenuhan kegiatan intervensi spesifik yang dilakukan tahun 2022 yaitu pemenuhan kebutuhan intervensi TTD, skrining anemia dan Makanan tambahan, peningkatan kapasitas dilaksanakan di tingkat Pusat sampai Puskesmas untuk tenaga Kesehatan, pengadaan alat antropometri kit sebanyak 41.410 unit melalui DAK Fisik untuk Posyandu dari seluruh kab/kota di Indonesia.

Dalam peraturan presiden tentang pencegahan dan penurunan stunting, diamanatkan bahwa calon

pengantin atau remaja usia subur harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan selama 3 bulan serta bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi pencegahan stunting. Berdasarkan hal tersebut, sinergi juga dilakukan BKKBN bersama dengan Kementerian Agama dengan menghadirkan program Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra-Nikah.

Selain memberikan edukasi bagi calon pengantin, Kementerian Kesehatan

juga sudah mulai memberikan edukasi tentang pencegahan stunting pada usia remaja di sekolah-sekolah. Edukasi yang dilakukan melalui UKS, gerakan minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama di sekolah, aktivitas fisik bersama yang rutin dilakukan di sekolah, serta pendidikan atau materi kesehatan reproduksi agar siap pada masa reproduksi nantinya dan mencegah kehamilan beresiko namun belum seluas dan spesifik yang diinginkan.

Gerakan Bersama Cegah Stunting

Untuk mencegah stunting, Kemenkes membangun 5 Gerakan Cegah Stunting yang dilaksanakan bersama masyarakat oleh mitra, private sector, civil society organizations, universitas, mahasiswa, dll, untuk meningkatkan pengetahuan, cakupan layanan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu Gerakan AksiBergizi, Bumil Sehat, Posyandu Aktif, Jambore kader dan kampanye cegahStuntingItuPenting.

Salah satu intervensi untuk meningkatkan konsumsi TTD pada remaja putri adalah Program #AksiBergizi. Kegiatan ini diimplementasikan dalam mewujudkan sekolah dan madrasah sehat melalui TRIAS UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Evaluasi program dilakukan dengan studi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) pada remaja yang dilakukan di 30 sekolah di Klaten dan 30 sekolah di Lombok

Barat (540 siswa), dengan hasil (1) Peningkatan pengetahuan mengenai gizi sebelum dan sesudah intervensi; (2) Peningkatan proporsi semua remaja memiliki sikap positif terhadap TTD dan rematri yg mengkonsumsi TTD setiap minggu; (3) Peningkatan remaja yg melakukan aktivitas fisik 60 menit/hari dan mengonsumsi buah dan sayur setelah dilakukan intervensi; serta (4) Proporsi remaja putri yang mengonsumsi TTD mingguan 12 kali lebih mungkin naik setelah intervensi.

Dengan hasil tersebut, dalam upaya meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD pada remaja putri, yang merupakan salah satu indikator layanan intervensi gizi spesifik dalam percepatan penurunan stunting dengan target 58% pada tahun 2024, maka gerakan #AksiBergizi akan dilaksanakan serentak di 12 provinsi prioritas (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, NTB, NTT, Sulawesi

Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat). Sejalan dengan rangkaian kegiatan gerakan tersebut, Kementerian Kesehatan bermaksud mengadakan kampanye #AksiBergizi di 4 sekolah terpilih di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yaitu SMAN 1 dan 2 Cibinong, SMKAN 1 Cibinong dan SMPN 1 Cibinong sebagai upaya aktivasi kegiatan #AksiBergizi. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor terkait baik di tingkat pusat hingga daerah serta seluruh warga sekolah, khususnya remaja putri sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan ini. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi sekolah-sekolah lain untuk ikut melaksanakan kegiatan #AksiBergizi secara rutin sebagai bentuk upaya meningkatkan gizi remaja serta mencegah anemia pada remaja putri.

Oleh: Bagus Satrio Utomo



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



Penuhi
Gizi
Seimbang

Makan
Protein
Hewani
setiap
hari

Minum
sebutir TTD
seminggu
sekali

AKSI BERGIZI Di Sekolah

Remaja Bebas Anemia

#AksiBergiziBikinGlowing

#CegahStuntingItuPenting



Olahraga
setiap
hari



Perilaku
Hidup
Bersih dan
Sehat



f ditjen kesmas



@ditjenkesmas



humas kesmas



kesmas.kemkes.go.id



Kemenkes Jamin Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Program Jampersal

Dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, Kementerian Kesehatan RI mengupayakan salah satunya dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan sesuai standar melalui jaminan persalinan (Jampersal).

Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes dr. Ni Made Diah PLD, MKM Mengatakan klaim pelayanan Jampersal diajukan untuk Ibu paling lama 42 hari pasca persalinan atau Bayi paling lama 28 hari setelah persalinan.

“Penerima manfaat Jampersal dapat dilayani di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL),” ujar dr. Diah.

Untuk pelayanan Jampersal pada praktik mandiri bidan, diperkenankan dengan persyaratan bidan tersebut berjejaring dengan FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.



Pelayanan Jampersal di FKTP meliputi pelayanan antenatal, persalinan spontan (pervaginam), persalinan normal dengan tindakan emergency dasar, pelayanan ibu dan bayi baru lahir pra rujukan, pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir, pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan rawat inap di FKTP, pelayanan di FKTP mengikuti manfaat pelayanan JKN. Pelayanan Jampersal di FKRTL mengacu pada prosedur

penjaminan pelayanan Program JKN, yaitu dilakukan sesuai indikasi medis.

Dikatakan dr. Diah, prosedur pelayanan peserta Jampersal diawali dengan penetapan data peserta Jampersal yang diinput Dinas Kesehatan melalui sistem informasi aplikasi e-kohort. Data peserta akan divalidasi oleh Kemenkes dan BPJS melalui interkoneksi sistem informasi.

“Peserta yang memenuhi syarat akan dilakukan konfirmasi sebagai validasi peserta Jampersal. Peserta Jampersal dapat dilayani di seluruh FKTP maupun FKRTL yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ungkap dr. Diah.

Pelayanan yang diberikan oleh Fasyankes dapat diajukan klaim pembayaran melalui sistem informasi BPJS Kesehatan yang berlaku (PCare/EKlaim). BPJS Kesehatan akan melakukan

verifikasi pengajuan klaim, apabila sudah sesuai status klaimnya, maka tagihan pembayaran diteruskan kepada Kemenkes untuk dapat disetujui dibayar oleh Kementerian Kesehatan. Klaim pelayanan yang diberikan antara bulan Juli sampai November diterima sampai tanggal 15 Desember 2022. Klaim Pelayanan bulan Desember ditunggu sampai dengan 60 hari untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2023.



“Jadi prinsipnya nanti Fasyankes silahkan saja memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi baru lahir yang tidak mampu, yang tidak memiliki JKN nanti akan kami validasi dan otomatis pelayanan yang diberikan itu bisa kami bayarkan langsung ke fasilitas kesehatan,” ucap dr. Diah.

Paralel dengan pelaksanaan program Jampersal, Ibu dan Bayi Baru Lahir peserta Jampersal didaftarkan sebagai peserta PBI melalui Kementerian Sosial. Selanjutnya pada tahun 2023 seluruh sasaran ibu dan bayi baru lahir miskin untuk didaftarkan sebagai peserta PBI.

Program Jampersal ini sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi

Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui program Jampersal. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan akses pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, serta tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Inpres ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Langkah Kementerian Kesehatan dalam menindaklanjuti terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2022 antara lain:

- 1 Mengalokasikan anggaran Jampersal di tahun 2022 sebesar 800 miliar rupiah.
- 2 Menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022.
- 3 Melakukan pendataan dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam Program Jampersal berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

- 4 Melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan program Jampersal.
- 5 Memberikan persetujuan atas hasil verifikasi klaim yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan melakukan pembayaran klaim pelayanan Jampersal kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6 Melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal.
- 7 Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendaftarkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
- 8 Melakukan interkoneksi sistem informasi klaim Program Jampersal Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi BPJS Kesehatan; dan Melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan dan realisasi anggaran Program Jampersal kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk mendapatkan pelayanan dalam program Jampersal diperlukan syarat agar eligibilitas dapat diterbitkan. Syarat untuk mendapatkan eligibilitas peserta Jampersal sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Indonesia;
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah divalidasi;
3. Tidak dibatasi oleh wilayah kependudukan;
4. Belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kepesertaan JKN sudah tidak aktif (PPUBU yang di PHK lebih dari 6 bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 27 ayat 6 dan belum diusulkan menjadi peserta PBI);
5. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat daerah yang berwenang minimal setingkat kepala desa;
6. Ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi syarat eligibilitas ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kriteria/ketentuan; dan
7. Jika tidak memiliki NIK, Dinas Kesehatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu dalam pembuatan NIK.

Oleh: Plt. Direktur Gizi dan KIA pada temu media (10/22)



PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN 2022

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 terkait program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat kurang mampu pada 12 Juli 2022. Kebijakan ini bertujuan mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia

Syarat Peserta :

1. Berdomisili di wilayah Indonesia
2. Memiliki NIK
3. Bukan Peserta JKN
4. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
5. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dari Pihak Berwenang



*Hubungi Puskesmas/Dinas kesehatan Kabupaten/Kota untuk pendaftaran peserta Jampersal

Layanan Jampersal :

1. Pelayanan Antenatal
2. Pelayanan Persalinan
3. Pelayanan Pasca Persalinan
4. Pelayanan Bayi Baru Lahir
5. Pelayanan KB Pasca Persalinan

+ Transformasi Layanan Kesehatan Primer



Edukasi
Penduduk



Pencegahan
Primer





Pencegahan Sekunder



Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas layanan primer



Menteri Kesehatan Ajak Mitra Berkontribusi Bersama Cegah Stunting

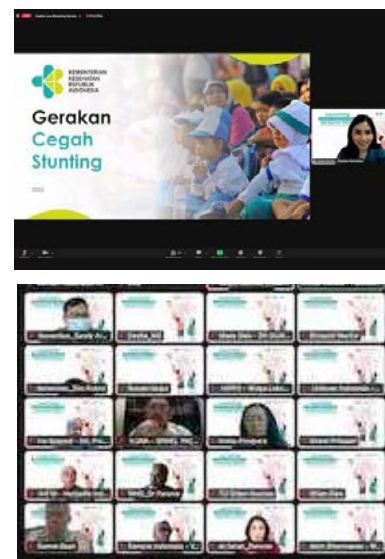
Mencegah stunting adalah hal yang penting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun-tahun mendatang. Meskipun tren stunting terus turun namun perlu percepatan hingga 3x lipat demi mencapai target stunting ke 14% di 2024.



Sebagai salah satu upaya percepatan tersebut, pada Jumat (9/9) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan “Launching Gerakan Cegah Stunting Bersama Mitra”. Menteri Kesehatan RI dalam sambutannya mengajak seluruh Mitra Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi bagian dari perubahan untuk generasi bangsa yang lebih sehat. Beliau menyampaikan bahwa gerakan ini

perlu dilakukan karena Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan stunting bukan hanya masalah kesehatan tapi banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Dukungan dan bantuan berbagai pihak termasuk Mitra tentu sangat dibutuhkan untuk menjangkau gap yang ada dalam upaya intervensi pencegahan stunting. Sehingga bersama kita bisa menyentuh sasaran yang lebih luas dan lebih banyak untuk mempercepat angka penurunan stunting di Indonesia.

Untuk itu Kementerian Kesehatan RI sudah memiliki paket-paket program/kegiatan yang dapat dipilih oleh Mitra dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing Mitra untuk dilaksanakan secara independen. Nantinya gerakan yang dilaksanakan akan didukung pemantauan dan pelaporannya kembali ke Kementerian Kesehatan.



Tidak lupa, gerakan-gerakan yang dilakukan tersebut juga butuh amplifikasi melalui berbagai promosi agar lebih banyak orang yang aware akan masalah stunting.

Bersama-sama, gerakan ini akan menolong 12,1 Juta Remaja Putri, 4,9 Juta Ibu Hamil, dan 22 Juta Balita.

Oleh: Marsha Anindita



Aksi bergizi, Menjadi Upaya Cegah Stunting dan Implementasi Transformasi Layanan Primer

Salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok umur mulai dari balita, remaja, ibu hamil sampai usia lanjut adalah Anemia atau kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 5-14 tahun sebesar 26,8 dan pada usia 15-24 tahun sebesar 32%. Hal ini berarti sekitar 3 dari 10 anak di Indonesia menderita anemia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya melalui suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) khususnya bagi remaja putri.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada Kamis (21/7) dilaksanakan aktivasi kegiatan #AksiBergizi yang diawali secara serentak di 4 sekolah terpilih di wilayah Kabupaten Bogor, antara lain di SMAN 1 Cibinong dengan penerima sekitar 630 siswi, SMPN 1 Cibinong sebanyak 640

siswi, SMAN 2 Cibinong sekitar 600 siswa, dan SMKN 1 Cibinong sekitar 500 siswa.

Aksi Bergizi dilaksanakan dengan tiga intervensi utama, yaitu (1) Sarapan dan Minum TTD bersama di sekolah/madrasah setiap minggu; (2) Edukasi gizi yang bersifat multi-sektor dengan tujuan mempromosikan asupan makan yang sehat dan aktivitas fisik; serta (3) Komunikasi untuk perubahan perilaku yang relevan dan komprehensif.

Gerakan #AksiBergizi juga akan dilaksanakan secara serentak di 12 provinsi prioritas (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, lebih lanjut Menkes

menyampaikan pemberian TTD merupakan upaya pencegahan atau preventif. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan akan berfokus pada upaya promotif dan preventif. Khususnya transformasi pada layanan primer yang tujuannya adalah untuk menciptakan orang yang sehat dengan menggerakkan langkah-langkah preventif.

Dikatakan Menkes, jumlah ibu melahirkan yang meninggal setiap tahun mencapai 7.800 orang. Salah satu penyebabnya adalah karena kurang zat besi, kalau kurang zat besi kemudian perempuan hamil dan saat melahirkan itu kemungkinan meninggalnya tinggi karena kekurangan darah.

“Jadi tugasnya saya memastikan adik-adik ini sehat dan harus dipastikan zat besinya cukup. Itu

mesti minum tablet tambah darah. Tabletnya diminum pada saat remaja, sebelum hamil dan setelah melahirkan,” ujar Menkes Budi.

“Titipan saya itu saja, agar teratur minum tablet tambah darah untuk mencegah kematian ibu, rajin berolahraga dan makan makanan bergizi agar sehat,” kata Menkes Budi.

Pemberian TTD merupakan upaya preventif untuk mencegah kematian ibu pada saat melahirkan. Upaya itu dilakukan sejak seorang perempuan berusia remaja.

Aksi bergizi ini menjadi salah satu upaya intervensi di hulu pada Remaja Putri yaitu remaja putri mengonsumsi TTD 1 tablet setiap minggu, skinning

anemia serta edukasi secara terus menerus kepada remaja putri. Ayo dukung #AksiBergizi karena #AksiBergiziBikinGlowing dan #CegahStuntingItuPenting

Oleh: Marsha Anindita



Bebas Stunting



Aktif minum Tablet Tambah Darah **C**ukupi konsumsi protein hewani
Bumil teratur periksa kehamilan **D**atang ke Posyandu setiap bulan
Eksklusif ASI 6 bulan

#CegahStuntingItuPenting



Pencanangan Gerakan Bumil Sehat Langkah Untuk mencegah AKI dan Stunting

Berepatan dengan peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2022, Kementerian Kesehatan mencanangkan Gerakan Bumil (Ibu Hamil) Sehat di Puskesmas Sikumana, NTT. Gerakan ini diadakan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan Prevalensi Bayi lahir stunting, dengan salah satu upaya

yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas.

Dipilihnya NTT sebagai lokasi pencanangan Gerakan Bumil Sehat ini dikarenakan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan persentase balita stunting tertinggi nasional. Berdasarkan data Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan sebanyak 269.658 balita dari 633.000 balita di NTT mengalami stunting. Artinya 42,7 persen balita di provinsi NTT mengalami stunting, angka tersebut di atas persentase balita stunting nasional sebesar 30,8 persen.

Pencanangan Gerakan Bumil Sehat ini dilaksanakan serentak di 34 Provinsi, diikuti secara langsung dari Puskesmas Sikumana dan diikuti secara daring oleh puskesmas, dinas kesehatan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan ibu hamil di seluruh Indonesia, baik melalui zoom maupun siaran youtube Kementerian Kesehatan. Dari Januari hingga Desember 2022 Puskesmas Sikumana memiliki sasaran ibu hamil sejumlah 1370 ibu. Dalam memberikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Puskesmas Sikumana telah melakukan upaya-upaya inovatif, antara lain



telah melaksanakan kelas Ibu hamil 'Sasando' di setiap kelurahan setiap 1 bulan sekali.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH mengatakan kegiatan ini didukung dengan adanya grup WhatsApp bagi ibu hamil dan bidan kelurahan untuk memudahkan ibu hamil dalam mengakses informasi mengenai kesehatannya selama kehamilan. Selain itu, Puskesmas

Sikumana juga telah melaksanakan supervisi fasilitatif sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

"Pekan Gerakan Bumil Sehat ini telah dimulai pada tanggal 14 Desember 2022. Hingga hari ini terdapat 1.224 fasilitas kesehatan yang telah berpartisipasi dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan antenatal sebanyak 66.920 ibu hamil," ucap Dirjen Maria.

Gerakan Bumil Sehat ini melibatkan kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Dinas Kesehatan provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat khususnya ibu hamil di seluruh Indonesia, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui zoom dan siaran youtube.

Oleh: Erlangga Wibisono Gunadi





Kabupaten Garut Siap Melaksanakan Integrasi Pelayanan Primer

Kabupaten Garut merupakan satu dari Sembilan lokasi uji coba Integrasi Pelayanan Primer yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Kesembilan lokasi uji coba mewakili kriteria urban, rural, terpencil dan sangat terpencil. Integrasi Layanan Primer ini merupakan pembenahan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia guna mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.

Wilayah kerja Puskemas Banjarsari yang terletak di Kabupaten Garut ini merupakan Puskesmas kategori terpencil. Posyandu Mangunjaya dan Posyandu Talagajaya terpilih menjadi Posyandu Prima. Sejak bulan Juli lalu telah dilakukan ujicoba yang dimulai dengan langkah persiapan hingga tahap evaluasi yang direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2022. Uji coba di Sembilan lokasi ini diharapkan dapat berjalan

dengan baik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain serta dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Pada Senin lalu (23/8) Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH beserta Bupati Garut, Rudi Gunawan turun langsung untuk melihat pelaksanaan uji coba di Kabupaten Garut ini. Seperti diketahui Integrasi Layanan Primer ini merupakan perwujudan dari transformasi system kesehatan dengan 6 pilar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif dan berkeadilan. Hal ini juga sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang.

Proses integrasi layanan primer terfokus pada integrasi data dan layanan kesehatan. Integrasi data dilakukan dengan sinkronisasi data dan aplikasi mulai di tingkat kota/ desa hingga pemerintah pusat.

Sedangkan untuk integrasi layanan dengan mengubah Puskesmas Pembantu atau UKBM lainnya menjadi Posyandu Prima yang siap untuk melayani masyarakat yang mencakup kegiatan promotif, preventif dan kuratif dengan pendekatan siklus hidup.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Posyandu Prima tidak terkotak-kotak melainkan dengan mengusung sistem kluster yaitu kluster ibu hamil-remaja, kluster usia produktif-lansia dan kluster penanggulangan penularan penyakit. Tidak hanya tenaga kesehatan, masyarakat dalam hal ini kader kesehatan juga memegang peranan yang penting. Kunjungan rumah menjadi salah satu kegiatan yang mendukung pelayanan Posyandu Prima.

“Pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun Posyandu Prima terfokus pada siklus hidup untuk memastikan masyarakat mendapat layanan sesuai

kebutuhan pada kehidupannya”, ujar Dirjen Maria. Layanan kesehatan primer ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan sampai ke masyarakat. Dirjen Maria juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Banjarsari termasuk di Posyandu Prima Wangunjaya dan Posyandu Prima Talagajaya sudah terlihat baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi salah satunya

durasi pelayanan yang lebih lama karena pencatatan yang detail. “Hasil dari 9 lokasi ujicoba ini akan menjadi pembelajaran sehingga pada bulan Oktober nanti dapat difinalkan untuk Layanan Kesehatan Primer di seluruh Indonesia”, tambah Dirjen Maria.

Bupati Garut, Rudi Gunawan pada kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya untuk mendukung layanan integrasi layanan primer ini. “Integrasi layanan primer ini sangat baik. Kami akan sangat

mendukung mulai dari alokasi anggaran hingga penyediaan SDM sehingga pelaksanaan Posyandu Prima ini akan mengcover 421 desa dan 21 kelurahan di Kabupaten Garut.” kata Bupati Rudi. “Pelayanan Kesehatan Primer ini juga merupakan salah satu cara mengabdikan untuk negeri, menyehatkan anak bangsa untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045”, tegasnya.

Oleh: Ema Puspita Wulandari





Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan program kesehatan jiwa Indonesia bertransisi dari kuratif dan rehabilitatif menjadi promotif preventif.

Hal itu disampaikan pada Global Mental Health Summit yang diadakan pada 13-14 Oktober 2022 di Roma, Italy sebagai delegasi dari Indonesia.

“Dalam agenda transformasi layanan primer Kementerian Kesehatan menekankan aksi promotif dan preventif yang lebih kuat. Program kesehatan jiwa kami bertransisi dari kuratif dan rehabilitatif berbasis fasilitas menjadi mempromosikan kesehatan jiwa, meningkatkan deteksi dini dan pencegahan, serta manajemen kasus yang lebih baik di tingkat pelayanan primer,” ujar Dirjen Endang, Jumat (14/10).

Global Mental Health Summit menjadi ajang untuk memperkuat aksi global dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengatasi isu-isu kunci yang berkaitan dengan perawatan kesehatan jiwa yang makin mundur di bawah tekanan krisis kesehatan dan kemanusiaan baru-baru ini, serta mengatasi kelemahan struktural yang mempersulit jutaan orang menerima perawatan kesehatan jiwa yang memadai.



Pada kesempatan tersebut delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan didampingi Direktur Kesehatan Jiwa, berkesempatan mendengarkan

dan berbagi pengalaman dengan negara-negara peserta lain. Salah satu pengalaman baik yang dibagikan delegasi Indonesia adalah banyak inovasi di level Puskesmas, misalnya memberdayakan penyandang gangguan jiwa yang sudah pulih, sehingga mereka bisa mandiri dan produktif.

Promosi kesehatan jiwa di masyarakat dilakukan melalui Posyandu yang dilakukan oleh para kader kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan jiwa juga dilakukan melalui upaya kesehatan sekolah.

Sedangkan di tingkat kabupaten kota dan provinsi telah dibentuk Tim Pelaksana/Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai wadah koordinasi untuk pelaksanaan program kesehatan jiwa masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa

tahun 2014. Tim tersebut terdiri dari berbagai lini kementerian, organisasi profesi dan perwakilan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan jiwa.

Indonesia juga sangat terbuka akan kerja sama para mitra akademisi dan masyarakat sipil untuk dalam misi memperkuat pelayanan dan program kesehatan jiwa terpadu yang komperhensif dan berkelanjutan.

Kesehatan jiwa menjadi isu yang semakin banyak diperbincangkan

beberapa tahun ke belakang. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang terdampak tidak hanya pada aspek kesehatan namun juga ekonomi dan hubungan sosial.

Kementerian Kesehatan RI sendiri sudah sejak lama memiliki perhatian khusus pada kesehatan jiwa yang ditandai dengan pembentukan Direktorat Kesehatan Jiwa sejak tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, Direktorat Kesehatan Jiwa sempat berpindah pindah Direktorat Jenderal, dan

yang terkini berada didalam Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Transformasi Kesehatan yang saat ini sedang berlangsung di Kementerian Kesehatan RI juga mengubah program Kesehatan Jiwa di Indonesia.

—
Oleh; Sakri Sabatmaja





Public Health Fair HKN ke-58 Ajak Masyarakat mengenal Fase Kehidupan Untuk Hidup Sehat

Menutup rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menggelar Public Health Fair pada Minggu, 13 November 2022 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Pada acara ini, ada banyak kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Diantaranya senam transformasi kesehatan, penampilan spesial dari Anak Berkebutuhan Khusus, pertunjukan angklung oleh para lansia serta pemberian doorprize menarik kepada para peserta yang beruntung.

Selain itu, digelar pula berbagai booth pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua siklus hidup yang terbagi dalam 5 zona. Diantaranya zona pemeriksaan deteksi dini kesehatan jiwa, zona

lansia, zona usia produktif, zona remaja serta ibu hamil, balita dan anak usia sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari bayi hingga lansia, akan pentingnya cek kesehatan secara berkala sebagai upaya pencegahan risiko kesehatan atau menentukan pengobatan yang tepat kepada pasien.



“Melalui acara ini, kita ingin masyarakat di setiap fase kehidupannya, lebih memperhatikan apa yang harus dilakukan dan layanan kesehatan apa yang harus

diterima, misalnya usia produktif harus mulai rutin skrining kesehatan hipertensi dan gula darah, karena itu beban terbesar kesehatan kita, kalau bisa deteksi diawal akan lebih baik,” terang Dirjen Endang.

Dengan melakukan deteksi dini, lanjut Dirjen Endang, peluang kesembuhan pasien menjadi lebih besar, sehingga biaya perawatan pasien dan potensi kecacatan serta kematian pada pasien bisa ditekan. Untuk itu, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk rutin periksa kesehatan dan mulai membudayakan hidup bersih dan sehat.

Caranya dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik seperti mengonsumsi makanan rendah gula, garam dan lemak, tidak merokok, rutin melakukan aktivitas fisik dan cek kesehatan secara

berkala.

Disamping itu, mengingat masih dalam situasi pandemi, kebiasaan baik tersebut juga harus diimbangi dengan memperketat protokol kesehatan COVID-19 dan menyegerakan vaksinasi dosis lengkap juga booster terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid).

“Pandemi belum berakhir tapi sudah bisa terkendali, kita harus tetap waspada karena ada varian-varian

baru. Untuk pandemi kita tetap harus jaga protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 terutama booster kepada lansia karena mereka termasuk kelompok rentan,” ujar Dirjen Endang.

“Yang punya orang tua tolong segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau pos pelayanan vaksinasi untuk mendapatkan booster,” pinta Dirjen Endang.

Sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id





Layanan Promotif Preventif Jauh Lebih Murah Daripada Upaya Kuratif

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menggerakkan program kesehatan masyarakat Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program Kesehatan Masyarakat. Arah kebijakan transformasi layanan primer program kesehatan masyarakat dan rencana implementasi transformasi layanan primer di daerah pada tahun 2022-2024 ditegaskan pada Rakontek Program Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Bogor, 31 Oktober – 3 November 2022.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi di hadapan para Kepala Dinas Kesehatan dan pengelola Program Kesehatan Masyarakat se-Indonesia serta Poltekkes menyampaikan bahwa Rakontek

ini untuk memastikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2024 dapat tercapai dengan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam hal ini adalah Poltekkes.

Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin saat menyampaikan arahannya pada pembukaan Rakontek Kesmas menyampaikan bahwa pencegahan melalui promotif dan preventif saat ini menjadi penting. “Anggaran upaya kuratif sebelumnya dengan porsi yang lebih besar. Namun sekarang akan ditekankan pada pencegahan sehingga anggaran dan program akan dititikberatkan pada upaya promotive salah satunya dengan mengembangkan layanan primer, Posyandu dan laboratorium kesehatan”, ujar Menkes Budi.

Menkes Budi juga menyampaikan bahwa intervensi layanan primer

menjadi sangat penting karena pembiayaan dalam intervensi tersebut tergolong lebih murah. Di berbagai negara maju, intervensi layanan primer ini terbukti memiliki berdampak positif. Hal tersebut terlihat dari pembiayaan kuratif yang menurun dan umur harapan hidup masyarakat yang membaik. Untuk itu berbagai hal perlu dilaksanakan guna mendukung pelayanan kesehatan primer yang berkualitas untuk masyarakat. Revitalisasi Posyandu menjadi salah satunya.



Posyandu kedepannya akan memiliki pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup. Pelayanan akan diberikan kepada masyarakat yang dimulai dari usia bayi hingga lanjut usia. Sehingga berbagai sumberdaya akan disediakan guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penyediaan alat pemeriksaan yang memadai dan didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Selain itu sebagai pelayanan kesehatan yang sangat dekat dengan

masyarakat, Posyandu kedepannya akan melayani skrining penyakit menular dan tidak menular. Bukan hanya untuk mengobati namun juga mendeteksi permasalahan kesehatan masyarakat sedini mungkin sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Menkes Budi juga menyampaikan bahwa Poltekes juga harus mendukung transformasi kesehatan dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mencetak sumber daya kesehatan

yang berkualitas. “Tenaga kesehatan yang dicetak oleh Poltekes harus berkontribusi untuk kesehatan masyarakat”, tegas Menkes Budi. Poltekes juga diharapkan dapat melakukan riset implementasi kebijakan dan capaian program yang dapat menjadi masukan serta acuan bagi pemerintah untuk memajukan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

—
Oleh: Ema Puspita Wulandari





Peringati Hari AIDS Sedunia, Inilah Kendala dan Upaya Kemenkes Tangani HIV di Indonesia

Hari AIDS Sedunia (HAS) diperingati setiap tanggal 1 Desember. Pada tahun 2022, Global mengangkat tema “Equalize” dan Indonesia mengusung tema “Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS” dengan menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengendalian HIV/AIDS.



Kementerian Kesehatan RI menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data terbaru menunjukkan sekitar 51 persen kasus HIV baru yang

terdeteksi diidap oleh remaja dan berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12.533 kasus HIV dialami oleh anak usia 12 tahun ke bawah. “Jadi dulu yang muda itu kecenderungan karena jarum suntik, tapi sekarang karena sudah hubungan seksual. Ini adalah tanda awas bagi kita,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu saat dijumpai pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Kamis (1/12/2022). Maxi juga menambahkan bahwa menuntaskan epidemi HIV/AIDS di Indonesia menjadi sulit sebab tidak banyak pasien yang mau menjalani pengobatan dengan terapi ARV. Kondisi ini membuat banyak pasien HIV akhirnya terdiagnosa AIDS dan meninggal dunia.

Indonesia perlu mencontoh penanganan pencegahan HIV/AIDS di Thailand. “Thailand itu yang sudah dilakukan yaitu edukasi ke masyarakat. Sudah aware di sana kan termasuk salah destinasi yang disukai, kemudian preventif di sana contohnya ada kondom, di sana sudah biasa dan ada dimana-mana. Jaringan komunitas di sana juga



berperan penting sekali dalam penanggulangan HIV,” tambahnya.

Selain itu, UNAIDS Country Director, Krittayawan Tina Boonto juga menyampaikan bahwa studi baru sebutkan jika perempuan yang alami kekerasan lebih rentan terpapar HIV.



“Dinamika kekuatan yang tidak setara antara laki laki dan perempuan meningkatkan kerentanan perempuan

dan anak perempuan terhadap HIV. Ketidaksetaraan ini hanya dapat dihadapi jika kita semua mendukung kerja-kerja program penanggulangan AIDS,” tambahnya.

Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia berupaya mencapai Ending AIDS pada tahun 2030. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, mengungkapkan rencana Kemenkes untuk penanggulangan kasus AIDS di Indonesia.

“Kemenkes RI berkomitmen mengakhiri endemi HIV 2030

dengan upaya melakukan skrining pada ibu hamil dan penguatan edukasi terkait kesehatan reproduksi kepada kelompok anak/remaja di sekolah, selain itu juga melibatkan kelompok agama atau organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi terhadap remaja di masjid ataupun di gereja. Tentu ini dimulai dari sendiri yakni komitmen diri sendiri untuk menolak, karena tidak ada cara lain untuk mencegah HIV.” ujarnya.

Oleh: Risti Paramita Wida Sena



GALERI KESMAS



Giat Sanggar SBH Seri



**Penandatanganan PKS
dengan Mitra**



**Kunjungan Kerja Dirjen Kesmas
ke Kabupaten Sragen**



Upacara 17 Agustus 2022



**Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama
di Lingkungan Kemenkes**



Rapat dengan Komite III DPD RI



Rapat Koordinasi Teknis 2022



Upacara HKN 2022



Pertemuan Komdat 2022



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



ditjen kesmas



@ditjenkesmas



humas kesmas



kesmas.kemkes.go.id

